

ABSTRAK

Pada dasarnya menunaikan ibadah haji dan umrah itu merupakan keinginan setiap umat muslim. Tetapi, ibadah umrah ini dinilai lebih terjangkau harganya dibandingkan dengan ibadah haji. Ditambah lagi, banyak biro perjalanan umrah yang menawarkan harga promo. Salah satunya yaitu biro perjalanan First Travel yang menawarkan harga promo senilai 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Puluhan ribu jemaah menjadi korban penipuan First Travel dengan kerugian mencapai 848.700.000.000 (delapan ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah). Dalam hal ini sudah jelas First Travel melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 65 yang menyatakan bahwa PPIU dilarang menelantarkan jemaah umrah, sehingga jemaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum First Travel terhadap konsumen (calon jemaah umrah) dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan calon jemaah umrah terhadap Putusan Pengadilan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder serta bahan pustaka yang ada yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dengan menggunakan metode analisis data yaitu metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 65 yang menyatakan bahwa PPIU dilarang menelantarkan jemaah umrah, sehingga jemaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi. Jika dihubungkan dengan prinsip pertanggungjawaban hukum, maka tanggung jawab dalam hal adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Pasal 41 ayat 7 PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PPIU yaitu PPIU wajib mengembalikan biaya penyelenggaraan ibadah umrah kepada jemaah. Terkait dengan putusan pengadilan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk yang telah ditolak oleh Majelis Hakim, jika dihubungkan dengan SK Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang dimana tindakan penelantaran oleh First Travel yang menyebabkan kerugian secara materi dan immateri yang dialami oleh calon jemaah umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi berupa pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah umrah dan diwajibkan mengembalikan seluruh biaya umrah kepada konsumen atau dengan memberangkatkan seluruh jemaah umrah yang telah mendaftar kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah lainnya tanpa menambah biaya apapun.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, dan Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

Basically, performing the Hajj and Umrah is the desire of every Muslim. However, this Umrah pilgrimage is considered to be more affordable than the pilgrimage. Add more, many Umrah travel agencies offer promo prices. One of them is the First Travel travel agency, which offers a promo price of 14,300,000 (fourteen million three hundred thousand). Tens of thousands of pilgrims became victims of the First Travel fraud with a loss of up to 848,700,000,000 (eight hundred forty-eight billion seven hundred million rupiah). In this case, it is clear that First Travel has committed acts against the law and has violated Government Regulation Number 79 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Article 65 of the Hajj which states that PPIU is prohibited from neglecting the Umrah congregation, so that the Umrah congregation fails to go to Saudi Arabia. The purpose of this research is to find out and analyze the legal responsibility of First Travel to consumers (prospective Umrah pilgrims) and to find out and analyze the efforts that can be made by prospective Umrah pilgrims to the Court Decision Number 52 / Pdt.G / 2019 / PN.Dpk.

The research method used by the author in the preparation of this thesis is a normative juridical research method, with the aim of analyzing the problems that occur by collecting primary legal materials, secondary legal materials and existing library materials related to the problems that the author examines. . Then by using the data analysis method, namely the qualitative normative analysis method.

The results of this thesis research can be concluded that with the application of Government Regulation Number 79 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Article 65 of the Hajj, which states that the PPIU is prohibited from neglecting the Umrah congregation, so that the Umrah congregation fails to go to Saudi Arabia. If it is related to the principle of legal responsibility, then responsibility in the event of default and unlawful acts in relation to Article 41 paragraph 7 PMA Number 8 of 2018 concerning PPIU, namely PPIU is obliged to return the cost of organizing the Umrah pilgrimage to the congregation. Regarding the court decision Number 52 / Pdt.G / 2019 / PN.Dpk which has been rejected by the Panel of Judges, if it is related to the Decree of the Minister of Religion Number 589 of 2017, where acts of neglect by First Travel caused material and immaterial losses suffered by prospective Umrah pilgrims in accordance with the provisions of Article 65 of Government Regulation Number 79 of 2012 concerning Implementation of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj. This provision regulates sanctions in the form of revocation of permits as the organizer of the Umrah pilgrimage and the obligation to return all Umrah fees to consumers or by dispatching all Umrah pilgrims who have registered with other umrah pilgrimage organizers without adding any fees.

Keywords: Accountability, Business Executors, and Deeds Against the Law.